

ABSTRAK

Akad *Wakalah* merupakan mekanisme pelimpahan kuasa dalam hukum Islam yang memiliki relevansi dengan pemberian kuasa khusus kepada advokat dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg. Dalam praktiknya, lembaga bantuan hukum berbasis syariah perlu memastikan bahwa pelimpahan kuasa tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *Wakalah* dalam pelimpahan kuasa khusus pada perkara perdata di LBH (APSI) Bangkalan serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan advokat dan pihak terkait, observasi terhadap praktik pemberian kuasa, serta studi dokumentasi terhadap surat kuasa dan ketentuan hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kuasa khusus di LBH APSI Bangkalan pada prinsipnya telah mencerminkan akad *Wakalah muqayyadah*, karena kewenangan advokat dibatasi secara tegas pada objek perkara tertentu. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa perbedaan pemahaman klien mengenai ruang lingkup kuasa dan belum adanya pedoman baku yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip syariah dengan hukum positif, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan penyusunan standar operasional yang lebih sistematis guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak klien.

Kata kunci: Akad *Wakalah* , Kuasa Khusus, Perdata

ABSTRACT

The Wakalah contract is a mechanism for the delegation of authority in Islamic law that is relevant to granting special power of attorney to advocates in civil cases as regulated in Article 123 HIR and Article 147 RBg. In practice, sharia-based legal aid institutions need to ensure that the delegation of authority not only complies with positive law but also aligns with sharia principles. This research aims to analyze the implementation of the Wakalah contract in the delegation of special authority in civil cases at LBH (APSI) Bangkalan and assess its compliance with Islamic law and applicable regulations.

This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained thru interviews with advocates and related parties, observations of the power of attorney practices, and documentation studies of power of attorney letters and relevant legal provisions.

The research results show that the delegation of special authority at LBH APSI Bangkalan essentially reflects the Wakalah muqayyadah contract, as the authority of the lawyer is strictly limited to specific case objects. However, there are still obstacles in the form of differing client understandings regarding the scope of authority and the absence of standard guidelines that explicitly integrate sharia principles with positive law, thus necessitating the strengthening of education and the development of more systematic operational standards to enhance legal certainty and client rights protection.

Keywords: *Wakalah Contract, Special Power of Attorney, Civil Law*